

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali)

**I MADE PRADANA ADIPUTRA
NI KADEK DESI DWIYANTARI
DEWA KADEK DARMADA**
Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract: *This study aims to determine the effect Local Revenue (PAD), and Excess Fund Balance Budget Calculation (SiLPA) on the quality of human development directly or indirectly through the allocation of capital expenditures in the government district / city in Bali. The method used is quantitative research methods. Sampling of this study using purposive sampling method and obtain each 54 data as a sample for the period 2008-2013. The data used is the data of PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA and ABM, as well as the value of the Human Development Index. The data is sourced from DJPK Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics. Data were analyzed using path analysis supported by SPSS version 19. Hasil research shows that only a direct influence PAD and SiLPA that affect the quality of human development. While the influence indirectly, PAD, DAU, DAK, and DBH does not affect the quality of human development through the allocation of capital expenditure.*

Keywords: *income, balance funds, SiLPA, IPM, capital expenditure*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap kualitas pembangunan manusia secara langsung maupun secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh masing-masing 54 data sebagai sampel untuk periode 2008-2013. Data yang digunakan adalah data realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA dan ABM, serta nilai Indeks Pembangunan Manusia. Data tersebut bersumber dari DJPK Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dibantu dengan SPSS versi 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung hanya PAD dan SiLPA yang berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan pengaruh secara tidak langsung, PAD, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.*

Kata kunci: *pendapatan, dana perimbangan, SiLPA, IPM, belanja*

1. PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, manusia merupakan sentral dari suatu proses pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan modal pembangunan yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Salah satu langkah yang harus diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan suatu pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kualitas pembangunan manusia suatu negara atau daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) (Dwiyantari,2015).

IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi (Christy dan Priyo Hari Adi, 2009). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (www.bps.go.id)

Strategi pembangunan suatu negara harus mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan nasional secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal yang diharapkan menghasilkan 2 (dua) manfaat, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan. (Adisasmita, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan atas beban APBD. Pengeluaran pembiayaan untuk penyelenggaraan ini digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Pengalokasian belanja pada masing-masing jenis belanja diprioritaskan untuk urusan wajib. Urusan wajib yang dimaksud adalah belanja yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja modal yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Apabila melihat keberadaan PAD Kabupaten/Kota di Bali yang masih belum merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, hal tersebut disebabkan karena PAD yang tinggi selama ini diperoleh oleh kabupaten/kota yang potensi daerahnya sangat besar didominasi oleh adanya tempat pariwisata. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan meminimalisasi terjadinya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran daerah.

Adanya ketimpangan PAD antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pada Kabupaten/Kota di Bali dan propinsi lainnya di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka menutupi kesenjangan fiskal daerah yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pembangunan dengan PAD nya.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah. DBH yang diberikan terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom. Sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus daerah tersebut.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai belanja modal. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Hubungan antara DAU, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pernah diteliti oleh Christy dan Priyo (2009) yang menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Penelitian Abdullah dan Halim (2004) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal, sementara PAD tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitiannya secara parsial hanya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yovita dan Utomo (2011) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sementara itu Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel *intervening* pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran belanja modal juga terbukti berpengaruh positif terhadap IPM.

Sedangkan penelitian Wulandari (2014) tentang pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia menunjukkan hasil adanya pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan Wandira (2013) tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sementara itu SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Sementara itu penelitian Kartikasari (2014) tentang pengelolaan PAD dan SiLPA dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau dikenal dengan SiLPA berpengaruh terhadap tingkat kinerja pelayanan publik. SiLPA tahun anggaran sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal untuk pembangunan daerah.

Bali merupakan salah satu daerah destinasi wisata di Indonesia yang tidak pernah sepi dari kunjungan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hal ini tentunya akan

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pemberian dana perimbangan, penggunaan dana anggaran dan pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana guna menarik investor untuk berinvestasi di Bali serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal tersebut diharapkan akan berdampak terhadap pendekatan tiga dimensi dasar dalam IPM yaitu masyarakat yang umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Bali.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agustyas (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi pada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis PAD diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu dana hasil pungutan pajak daerah, dana hasil pungutan retribusi daerah, dana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.2 Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bagian daerah meliputi pajak dan sumber daya alam. Pajak dalam hal ini terdiri atas pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang dalam negeri dan PPh pasal 21, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun mulai tanggal 1 Januari 2014, untuk pajak bumi dan bangunan dipungut oleh daerah. Sumber daya alam terdiri atas kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Kuncoro (2004) DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 27, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal alokasi dasar. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memerhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah agar kesenjangan pendapatan antar daerah dapat diperkecil (Bratakusumah & Solihin, 2004).

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang telah ditetapkan pada APBN. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tiga kriteria dalam penentuan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria

khusus ditetapkan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. DAK digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

2.3 Belanja Modal

Sehubungan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah perlu menggunakan dana yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, salah satunya dengan mengalokasikannya ke dalam belanja modal. Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Bastian (2006), Belanja modal dialokasikan untuk menampung seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan untuk pengadaan barang-barang investasi atau fasilitas-fasilitas tertentu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Belanja modal yang digunakan Pemerintahan Daerah menurut SAP, meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.

2.4 Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2.5 *Kualitas Pembangunan Manusia*

Mengutip isi *Human Development Report (HDR)* pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (www.bps.go.id). Kualitas pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi (Christy dan Priyo, 2009).

2.6 *Kerangka Konseptual*

Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan memberikan pengaruh terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) melalui alokasi Belanja Modal. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada gambar 1.

2.7 *Rumusan Hipotesis*

2.7.1 *Hubungan PAD, Kualitas Pembangunan Manusia dan Alokasi Belanja Modal*

Mardiasmo (dalam Christy dan Priyo, 2009) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Pengeluaran daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar masyarakat dialokasikan pada belanja modal. PAD dalam belanja modal dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

Penelitian Christy dan Priyo (2009) yang menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh

terdapat belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Penelitian Abdullah dan Halim (2004) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal, sementara PAD tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) memberikan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yovita dan Utomo (2011) menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran belanja modal juga terbukti berpengaruh positif terhadap IPM. Penelitian Wandira (2013) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H_{1a}: *Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia.*

H_{1b}: *Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.*

2.7.2 Hubungan DAU, Kualitas Pembangunan Manusia dan Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. DAU diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal.

Penelitian Christy dan Priyo (2009) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yovita dan Utomo (2011) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu Setyowati dan Suparwati (2012) membuktikan DAU berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) memberikan bukti empiris bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H_{2a}: *Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia.*

H_{2a}: *Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.*

2.7.3 Hubungan DAK, Kualitas Pembangunan Manusia dan Alokasi Belanja Modal

DAK dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan dari DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara itu penelitian oleh Setyowati dan

Suparwati (2012) memberikan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian Wandira (2013) membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H_{3a}: *Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia.*

H_{3a}: *Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.*

2.7.4 Hubungan DBH, Kualitas Pembangunan Manusia dan Alokasi Belanja Modal

DBH juga diberikan untuk mendanai kegiatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kualitas pembangunan manusia) di suatu daerah. Peningkatan kualitas pembanguana manusia dapat diwujudkan secara nyata melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dialokasikan pada belanja modal. Sehingga penggunaan DBH pada alokasi belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

Penelitian Wulandari (2014) tentang pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia menunjukkan hasil adanya pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan Wandira (2013) tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan DAK dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H_{4a}: *Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia.*

H_{4b}: *Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.*

2.7.5 Hubungan SiLPA, Kualitas Pembangunan Manusia dan Alokasi Belanja Modal

SiLPA dapat digunakan untuk pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya ataupun yang telah direncanakan pada tahun yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Sehingga penggunaan SiLPA pada suatu daerah yang dialokasikan melalui belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.

Penelitian SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Penelitian Kartikasari (2014) tentang pengelolaan PAD dan SiLPA dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau dikenal dengan SiLPA berpengaruh terhadap tingkat kinerja pelayanan publik. SiLPA tahun anggaran sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H_{5a}: *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia..*

H_{5b}: *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal.*

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Riset

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali. Sasaran penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Dokumen yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Bali serta data IPM yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing Kabupaten/Kota di Bali periode 2008-2013. Data-data ini diperoleh langsung melalui web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui website www.djpk.depkeu.go.id dan melalui web resmi badan pusat statistik, yaitu www.bps.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dan data IPM Kabupaten/Kota di Bali. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan memperhatikan ketersediaan data, periode yang memberikan gambaran terbaru, serta periode yang relevan dengan keadaan sekarang. Sampel dalam penelitian sebanyak 54 yaitu LRA dan Indeks Pemebangunan Manusia (IPM) 8 kabupaten dan 1 kota di Bali periode 2008-2013

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran, Alokasi Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Penjelasan variabel, sub variabel/dimensi, indikator dan skala pengukuran ditampilkan pada tabel 1.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang dibantu dengan SPSS versi 19. Dalam penelitian digunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan koefisien *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas digunakan nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 . Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan ketentuan jika memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi melalui uji *Durbin Watson* dengan memperhatikan letak nilai *d* terletak antara *dU* dan $(4-dU)$ maka tidak terjadi autokorelasi

Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Hipotesis penelitian ini ingin membuktikan apakah PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA masing-masing berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pembangunan manusia (yang diproksikan dengan IPM) dan berpengaruh secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal (ABM) sebagai variabel *intervening*.

Koefisien jalur dalam penelitian ini dihitung dengan dua persamaan regresi berganda (analisis regresi dengan satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen). Analisis regresi pertama dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM). Sedangkan persamaan regresi kedua dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA terhadap IPM secara langsung, serta pengaruh Alokasi Belanja Modal (ABM) terhadap kualitas pembangunan manusia (yang diproksikan dengan IPM). Model persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

a. Model Persamaan Regresi I

$$\text{LnABM} = \alpha + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnDAU} + \beta_3 \text{LnDAK} + \beta_4 \text{LnDBH} + \beta_5 \text{LnSiLPA} + e_1$$

b. Model Persamaan Regresi II

$$\text{IPM} = \alpha + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnDAU} + \beta_3 \text{LnDAK} + \beta_4 \text{LnDBH} + \beta_5 \text{LnSiLPA} + \beta_6 \text{LnABM} + e_2$$

Keterangan:

- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- LnABM : Alokasi Belanja Modal
- LnPAD : Pendapatan Asli Daerah
- LnDAU : Dana Alokasi Umum
- LnDAK : Dana Alokasi Khusus
- LnDBH : Dana Bagi Hasil
- LnSiLPA : Sisa lebih pembiayaan anggaran
- α : Konstanta, yaitu besarnya nilai variabel dependen jika nilai variabel independen sama dengan nol.
- $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi yaitu menyatakan perubahan nilai dependen apabila terjadi perubahan nilai variabel independen.
- e : *Error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Nilai koefisien jalur pada persamaan pertama dan kedua merupakan nilai jalur masing-masing persamaan. Apabila nilai *standardized* beta pada persamaan pertama signifikan ($p \text{ value} \leq (\alpha) = 0,05$), berarti variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA) mempengaruhi variabel *intervening* (ABM). Begitu pula pada persamaan kedua. Apabila nilai *standardized* beta signifikan ($p \text{ value} \leq (\alpha) = 0,05$), berarti variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA) berpengaruh langsung ke variabel dependen (IPM) dan dapat juga berpengaruh tidak langsung melalui variabel *intervening* (Alokasi Belanja Modal).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, serta jumlah data. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui profil dari data penelitian melalui hubungan antar variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Statistik deskriptif pada tabel 2 memberikan gambaran mengenai jumlah total (n) dari 54 data, nilai rata-rata masing-masing variabel PAD, DAU, DAK, SiLPA, Belanja Modal (dalam jutaan rupiah) dan IPM (dalam prosentase) termasuk nilai maksimum dan minimum masing-masing variabel serta simpangan baku dari masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan data yang mencakup tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk persamaan regresi pertama sebesar 0,696 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,709 yaitu jauh di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan data residual pada persamaan regresi pertama terdistribusi normal. Begitu pula pada persamaan regresi kedua yang menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,763 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,669 yaitu jauh di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05) yang menunjukkan data residual terdistribusi normal (tabel 3). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independen jauh di atas 0,10. Begitu pula hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Nilai VIF pada masing-masing variabel yang jauh di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antarvariabel independen dalam model regresi pertama (tabel 3). Hasil perhitungan *tolerance* pada masing-masing variabel independen jauh di atas 0,10. Begitu pula hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Nilai VIF pada masing-masing variabel yang

jauh di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi kedua (tabel 3)

Hasil uji autokorolasi pada tabel terlihat bahwa nilai *Durbin Waston* 2,090 yang berada di atas nilai tabel du (batas atas) yaitu sebesar 1,7684 dan di bawah nilai 4 dikurangi du ($4 - 1,7684 = 2,2316$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi pertama. Tabel 3 menunjukkan nilai *Durbin Waston* sebesar 1,955 yang berada di atas nilai tabel du (batas atas) yaitu sebesar 1,8151 dan di bawah nilai 4 dikurangi du ($4 - 1,8151 = 2,1849$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi kedua.

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *Absolut Unstandardized Residual* persamaan regresi pertama (AbsUt1). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi pertama tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *Absolut Unstandardized Residual* persamaan regresi kedua (AbsUt2). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi kedua tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.3 Pengujian Hipotesis

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis 1a diterima. Dengan demikian semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Hasil ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Pada persamaan regresi pertama diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (LnABM), yang berarti Pendapatan Asli Daerah (LnPAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (LnABM). Hasil ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Abdullah dan Halim (2004), Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Setyowati dan Suparwati (2012) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Jadi semakin tinggi PAD akan meningkatkan pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali. Namun hasil uji pengaruh alokasi belanja modal terhadap kualitas pembangunan manusia menunjukkan alokasi belanja modal (LnABM) tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal tidak akan mempengaruhi peningkatan kualitas pembangunan manusia dan alokasi belanja modal tidak mampu memediasi hubungan pengaruh PAD terhadap kualitas pembangunan manusia. Hasil uji regresi menunjukkan mediasi alokasi belanja modal, ternyata tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Sehingga hipotesis 1b ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin besarnya PAD yang dialokasikan pada belanja modal tidak digunakan untuk program-program yang tepat yang dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Hipotesis 2a dalam penelitian ini ditolak, dimana peningkatan nilai DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Bali tidak dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Tidak adanya pengaruh DAU terhadap kualitas pembangunan manusia mungkin disebabkan karena pengalokasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan kualitas perekonomian di daerah tersebut. Sedangkan hipotesis 2b dalam penelitian ini juga tidak dapat didukung oleh hasil uji statistik dimana Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini diterima oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Bali tidak digunakan atau sedikit digunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang dialokasikan dalam alokasi belanja modal. Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya sangat signifikan, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali mungkin lebih besar dialokasikan pada pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan belanja-belanja daerah lainnya. Secara langsung DAU tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia dan setelah dimediasi melalui alokasi

belanja modal, ternyata belanja modal juga tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007); Christy dan Priyo (2009), Setyowati dan Suparwati (2012), Yovita dan Utomo (2011), serta Wandira (2013).

Hipotesis 3a dalam penelitian ini juga ditolak. Artinya bahwa DAK tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Tidak adanya pengaruh DAK terhadap kualitas pembangunan manusia mungkin disebabkan karena pembangunan manusia tidak hanya dapat dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara DAK lebih diperuntukkan kepada peningkatan sarana dan prasarana (fisik) dan jumlah DAK jauh lebih kecil dibandingkan dana lainnya, seperti PAD dan DAU. Sedangkan hipotesis 3b juga ditolak artinya DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sebelum dimediasi oleh alokasi belanja modal ternyata DAK tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Begitu pula setelah dimediasi melalui alokasi belanja modal, DAK tetap tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia karena alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal. Jika dilihat dari jumlahnya, rata-rata DAK yang diterima oleh kabupaten/kota di Bali dibandingkan dengan rata-rata alokasi belanja daerah kabupaten/kota di Bali, jumlah DAK yang diterima hanya 4,15% dari rata-rata total belanja daerah. Sedangkan nilai alokasi belanja modal hanya 16,22% dari total belanja daerah kabupaten/kota di Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun Dana Alokasi Khusus yang selama ini diterima oleh kabupaten/kota di Bali digunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang dialokasikan dalam alokasi belanja modal, karena persentasenya kecil, maka tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Darwanto dan

Yustikasari (2007, Setyowati dan Suparwati (2012) serta Wandira (2013) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis 4a dalam penelitian ini ditolak, artinya DBH tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia. Hal tersebut terjadi mungkin terjadi karena pemerintah daerah di Bali lebih memfokuskan alokasi DBH untuk tujuan lain di bidang perekonomiannya dan tidak memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sedangkan hipotesis 4b dalam penelitian juga ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Artinya pemerintah daerah di Bali masih minim menggunakan DBH dalam alokasi belanja modal untuk digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya rata-rata DBH yang diterima kabupaten/kota di Bali yaitu 5,08% dari rata-rata belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mempengaruhi kualitas pembangunan manusia secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal. Dalam hal ini, alokasi belanja modal tidak dapat memediasi hubungan pengaruh antara DBH dengan kualitas pembangunan manusia. Hasil ini berbeda dengan penelitian Wandira (2013) dan Wulandari (2014) yang menyatakan adanya pengaruh DBH terhadap belanja daerah dan belanja modal.

Hipotesis 5a dalam penelitian ini menunjukkan hasil adanya tidak adanya pengaruh SiLPA terhadap kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian adanya SiLPA pada setiap pemerintah daerah belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah masing-masing. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SiLPA yang ada tidak berhubungan langsung dengan kualitas pembangunan manusia. Artinya dana tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membeli sarana dan prasana publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tampak dengan diterimanya hipotesis 5b yang menyatakan bahwa adanya pengaruh SiLPA terhadap alokasi belanja modal dimana sisa lebih pembiayaan anggaran akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui SiLPA yang dialokasikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ardhini (2011) dan Kartikasari (2014) yaitu SiLPA berpengaruh pada belanja modal dan kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil uji statistik juga menunjukkan alokasi belanja modal yang merupakan variabel *intervening* pada penelitian ini tidak bernilai signifikan terhadap IPM yang berarti alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal belum mampu memediasi hubungan untuk variabel PAD, DAU, DAK, DBH dengan variabel IPM khususnya pada 8 kabupaten dan 1 kota di Bali.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja daerah kabupaten/kota di Bali. Sedangkan SiLPA melalui alokasi belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada daerah kabupaten/kota di Bali. Sementara itu DAU, DAK dan DBH belum mampu mempengaruhi kualitas pembangunan manusia karena tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai belanja modal

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Bali diharapkan mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan SiLPA yang diperoleh secara lebih baik dan benar (tepat guna) serta mengalokasikannya pada pengeluaran atau belanja untuk program-program atau kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel non keuangan sebagai variabel independen dan variabel *intervening* untuk menguji pengaruhnya terhadap kualitas pembangunan manusia, seperti kebijakan pemerintah daerah, pandangan atau kebudayaan masyarakat, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian dan menggunakan data yang lebih lengkap dan bervariasi dengan periode waktu penelitian yang lebih lama sehingga hasil penelitian lebih mampu digeneralisasi.

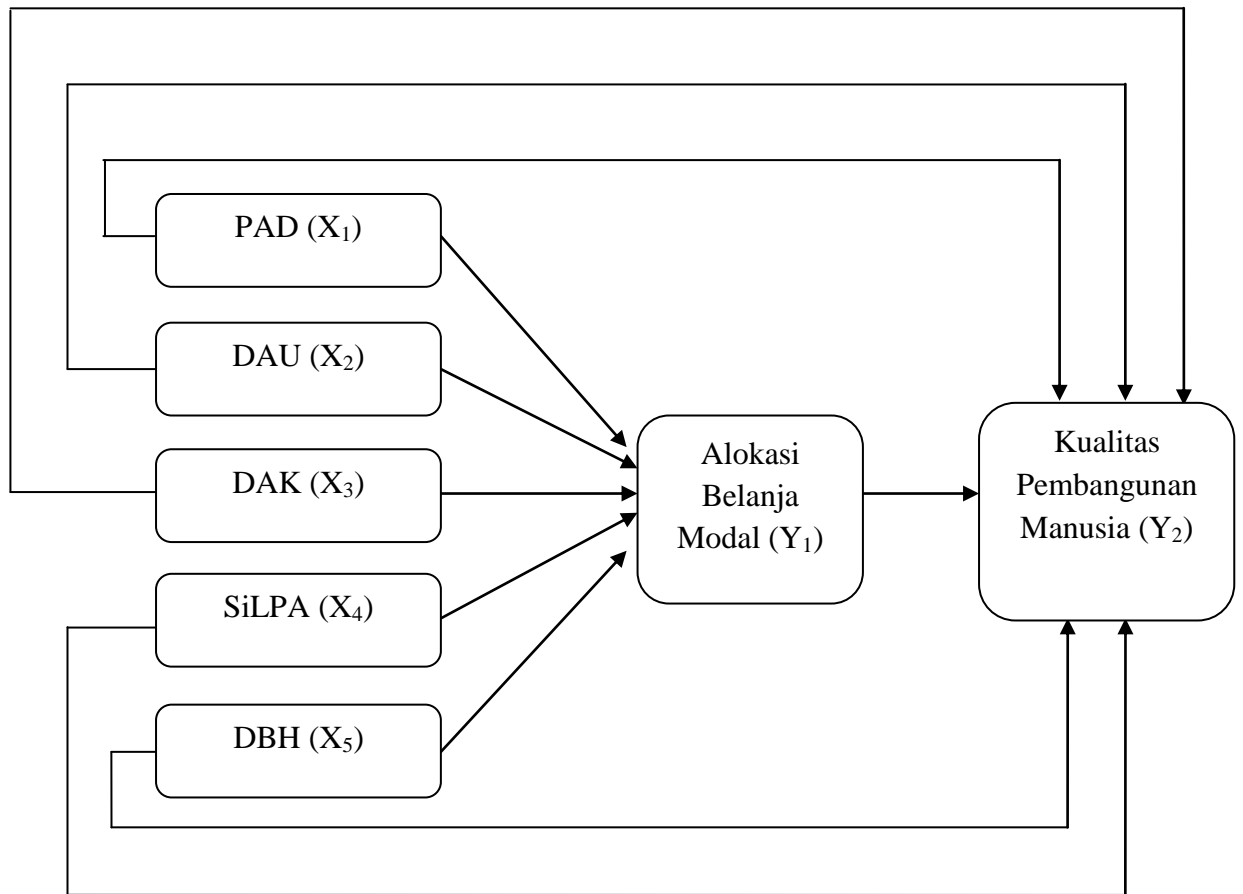
DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2011.*Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik.2014. "Indeks Pembangunan Manusia". Tersedia pada http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=26 (diakses tanggal 29 Mei 2015).
- 2014."Indeks Pembangunan Manusia Bali, 2008-2013". Tersedia pada http://bps.go.id/ipm.php?id_subyek=26¬ab=0 (diakses tanggal 20 Oktober 2014).
- 2014.*Badung dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
- 2014.*Bangli dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli.
- 2014.*Buleleng dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.
- 2014.*Gianyar dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar.
- 2014.*Jembrana dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana.
- 2014.*Karangasem dalam Angka 2014*.
- 2014.*Klungkung dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung.
- 2014.*Tabanan dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan.
- 2014.*Denpasar dalam Angka 2014*.Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.
- Bastian,Indra.2006.*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.Jakarta: Erlangga.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi.2009."Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia".*The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya, 10 Oktober 2010.

- Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.2014."Data Keuangan Daerah". Tersedia pada <http://djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>. (diakses tanggal 30 Mei 2015).
- Dwiyantari. Ni Kadek Desi. 2015. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Bali). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3) Koran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartikasari, Rofiqoh. 2014. Pengaruh Tingkat Kemandirian Dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah, Tingkat Kemandirian Dalam Mengelola Potensi Daerah Dan SiLPA Terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati.2012."Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhdap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)".*ISSN*, Volume 9, Nomor 1 (hlm.1411-1497).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*.15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.Jakarta.

- Wandira, Arbie Agus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, AAJ 2 (1). Pp 44-51. Universitas Negeri Semarang.
- Wulandari, Yolanda. 2014. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Yovita, Farah Marta dan Dwi Cahyo Utomo. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008-2010)". Tersedia pada <http://eprints.undip.ac.id/29478/1/> (diakses tanggal 10 Juni 2015).

LAMPIRAN



Gambar 1. Model Analisis Jalur

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel/Dimensi	Indikator	Skala
Independen (X) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X ₁)	Realisasi PAD dalam LRA	Besarnya jumlah realisasi PAD yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah	Rasio
Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₂)	Realisasi DAU dalam LRA	Besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat	Rasio
Dana Alokasi Khusus (DAK) (X ₃)	Realisasi DAK dalam LRA	Besarnya jumlah DAK yang diberikan pemerintah pusat	Rasio
Dana Bagi Hasil (DBH) (X ₄)	Realisasi DBH dalam LRA	Besarnya jumlah DBH yang diberikan pemerintah pusat	Rasio
Intervening (Y ₁) Alokasi Belanja Modal	Alokasi Belanja Modal dalam LRA	Besarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan setiap tahunnya	Rasio
Dependen (Y ₂) Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, dan Purchasing Parity Power	Rasio

**Tabel 2 Deskripsi Statistik PAD, DAU, DAK, DBH, ABM, SiLPA dan IPM
Kabupaten/Kota di Bali Periode 2008-2013**

Descriptive Statistics

	N	Minimu	Maximum	Sum	Mean		Std.
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Deviation
PAD	54	12655.75	2279113.50	14247402.03	263840.7784	61356.95375	450879.68660
DAU	54	131919.57	796419.22	21916254.61	405856.5668	17191.36950	126330.24978
DAK	54	218.18	67312.02	2122153.28	39299.1347	2329.72953	17119.94575
DBH	54	12756.67	186560.00	2560063.56	47408.5844	5752.05804	42268.82148
SiLPA	54	24780.38	901458.00	7147668.97	132364.2403	23495.88816	172658.81115
ABM	54	42555.10	773348.12	8176802.67	151422.2716	21285.63808	156416.85645
IPM	54	65.46	79.41	3912.57	72.4550	.42813	3.14609
Valid N (listwise)	54						

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 3 Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		54	54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	.46473542	2.42291747
	Most Extreme Differences		
	Absolute	.096	.091
	Positive	.096	.069
	Negative	-.067	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.709	.669
Asymp. Sig. (2-tailed)		.696	.763

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolonieritas pada Model Persamaan Regresi I

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
LnPAD	.191	5.233	Tidak terjadi multikolonieritas
LnDAU	.628	1.592	Tidak terjadi multikolonieritas

LnDAK	.470	2.128	Tidak terjadi multikolonieritas
LnDBH	.343	2.918	Tidak terjadi multikolonieritas
LnSiLPA	.203	4.938	Tidak terjadi multikolonieritas

a. Dependent Variable: LnABM

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel Hasil Uji Multikolonieritas pada Model Persamaan Regresi II

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
LnPAD	.176	5.686	Tidak terjadi multikolonieritas
LnDAU	.621	1.611	Tidak terjadi multikolonieritas
LnDAK	.464	2.153	Tidak terjadi multikolonieritas
LnDBH	.334	2.990	Tidak terjadi multikolonieritas
LnSiLPA	.184	5.428	Tidak terjadi multikolonieritas
LnABM	.497	2.011	Tidak terjadi multikolonieritas

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel Hasil Uji Autokorelasi pada Model Persamaan Regresi I

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709 ^a	.503	.451	.48834	2.090

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709 ^a	.503	.451	.48834	2.090

a. Predictors: (Constant), lnSiLPA, lnDAU, lnDAK, lnDBH, lnPAD

b. Dependent Variable: lnABM

Tabel Hasil Uji Autokorelasi pada Model Persamaan Regresi II

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.638 ^a	.407	.331	2.57293	1.955

a. Predictors: (Constant), lnABM, lnDAU, lnDAK, lnDBH, lnSiLPA, lnPAD

b. Dependent Variable: IPM

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Model Persamaan Regresi I

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.415	2.962		.478	.635
	lnPAD	.026	.084	.101	.310	.758
	lnDAU	-.136	.178	-.138	-.764	.448
	lnDAK	.025	.060	.085	.410	.684

InDBH	.036	.120	.073	.299	.767
InSiLPA	-.024	.134	-.056	-.176	.861

a. Dependent Variable: AbsUt1

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Model Persamaan Regresi I

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10.360	13.707		-.756	.454
	InPAD	-.089	.405	-.073	-.219	.827
	InDAU	.602	.825	.130	.730	.469
	InDAK	.057	.278	.042	.205	.838
	InDBH	-.476	.560	-.207	-.851	.399
	InSiLPA	.438	.647	.222	.678	.501
	InABM	.425	.456	.186	.932	.356

a. Dependent Variable: AbsUt2

Tabel Hasil Uji Statistik Parsial Model Persamaan Regresi I

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	2.664	4.322		.616	.541
	lnPAD	.250	.123	.474	2.037	.047
	lnDAU	.199	.259	.098	.766	.447
	lnDAK	.065	.088	.110	.743	.461
	lnDBH	-.190	.175	-.189	-	.282
					1.088	
	lnSiLPA	.426	.195	.493	2.182	.034

a. Dependent Variable: lnABM

Tabel Hasil Uji Statistik Parsial Model Persamaan Regresi II

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.072	22.861		3.065	.004
	lnPAD	1.642	.675	.652	2.434	.019
	lnDAU	.359	1.375	.037	.261	.795
	lnDAK	-.619	.464	-.220	-1.335	.188
	lnDBH	.577	.934	.120	.618	.539
	lnSiLPA	-.718	1.079	-.174	-.666	.509
	lnABM	-1.100	.760	-.230	-1.446	.155

a. Dependent Variable: IPM

Biodata Penulis 1 :

(1) Nama	I Made Pradana Adiputra,SE.,S.H.,M.Si
(2) Tempat&Tgl. Lahir	Surabaya, 9 Nopember 1973
(3) Program Studi/PT	S1 Akuntansi/Universitas Pendidikan Ganesha
(4) Alamat Surat - Telepon/Faks - E-mail - Telepon Rumah/HP	- adiputraundiksha@gmail.com 081999900190/082144462440
(5) Status Akademik	Dosen
(6) Pendidikan Terakhir - Tahun - Program Studi - Nama PT - Negara	2002 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Indonesia

Biodata Penulis 2 :

(1) Nama	Ni Kadek Desi Dwiyantari
(2) Tempat&Tgl. Lahir	1 Desember1993
(3) Program Studi/PT	S1 Akuntansi/Universitas Pendidikan Ganesha
(4) Alamat Surat - Telepon/Faks - E-mail - Telepon Rumah/HP	- dwiyantari@gmail.com 081999180750
(5) Status Akademik	Mahasiswa
(6) Jabatan Struktural	
(7) Pendidikan Terakhir - Tahun - Program Studi - Nama PT - Negara	2015 S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Indonesia

Biodata Penulis 3 :

(1) Nama	Dewa Kadek Darmada
(2) Tempat&Tgl. Lahir	Singaraja, 20 Januari 1994
(3) Program Studi/PT	S1 Akuntansi/Universitas Pendidikan Ganesha
(4) Alamat Surat - Telepon/Faks - E-mail - Telepon Rumah/HP	- Darmada.dewa@rocketmail.com 087762626309
(5) Status Akademik	Mahasiswa
(6) Pendidikan Terakhir - Tahun - Program Studi - Nama PT - Negara	2012 Ilmu Sosial SMAN 3 Singaraja Indonesia